

yang kompleks dan plural dewasa ini, setelah cara-cara legitimasi tradisional dianggap tidak lagi memadai. Secara sederhana, demokrasi deliberatif berargumen bahwa karena para warga merupakan sumber kekuasaan politik, maka sistem politik (parlemen, peradilan, dan eksekutif) yang terbentuk mesti selalu membuka diri dengan dan bertanggung jawab kepada mereka.

Tulisan ini bertujuan menunjukkan betapa urgennya demokrasi deliberatif itu bagi bangsa Indonesia, secara khusus bagi kepemimpinan nasional. Untuk mewujudkan tujuan itu, tulisan ini akan diuraikan dalam dua bagian utama. *Pertama*, akan didudukkan lebih dahulu apa itu demokrasi deliberatif (2.1) dan ruang publik sebagai konsekuensi dari teori politik Habermas itu (2.2). *Kedua*, menepong kepemimpinan nasional saat ini (3.1), dan mengusung kepemimpinan deliberatif dalam konteks Indonesia (3.2), serta sekadar sisipan: menengok kepemimpinan gereja (3.3). Lalu diakhiri dengan penutup (4)

### **1. Jürgen Habermas dan Demokrasi Deliberatif**

Bicara demokrasi deliberatif tidak lepas dari Jürgen Habermas. Itulah sebabnya sebelum memahami teori politik itu, sang filsuf diperkenalkan dahulu. Habermas adalah salah satu filsuf kontemporer terbesar yang pengaruhnya sangat luas. Karya-karyanya berpengaruh dalam berbagai bidang ilmu sosial dan kemanusiaan yang berbeda-beda. Para mahasiswa sosiologi, filsafat, politik, teori hukum, teologi, studi-studi kebudayaan, tak diragukan bersentuhan dengan nama Habermas.<sup>4</sup> Ada sejumlah alasan mengapa karya-karyanya berpengaruh sedemikian luas. *Pertama*, Habermas adalah seorang teoritikus inter-disiplin ilmu. Habermas tidak pernah berhenti pada satu domain keilmuan yang sempit. Ia selalu melampaui batas-batas disiplin suatu ilmu. Ia belajar filsafat, sosiologi, sains, sejarah, psikologi, politik, agama, sastra dan seni<sup>5</sup> di Göttingen, Zürich, dan Bonn. *Kedua*, dalam era yang dikacaukan oleh ekstrim fundamentalisme agama dan skeptisisme sains, Habermas muncul sebagai pembela utama keyakinan rasio pencerahan yang diyakininya sebagai pembimbing moralitas dan politik. Habermas dengan setia meyakini bahwa rasio tetap menduduki jantung komunikasi manusia, yang baginya merupakan mesin utama emansipasi manusia.<sup>6</sup>

Filsuf kenamaan yang masih hidup ini lahir 18 Juni 1929 di Düsseldorf, Jerman. Kakeknya adalah seorang Pendeta Protestan, dan ayahnya merupakan Ketua Kamar Dagang propinsi Rheinland-Westfalen di Jerman Barat. Banyak sekali karya yang dihasilkan oleh Habermas,

mengingat ia sudah menulis selama enam dekade (tahun 1950an hingga kini), yang praktis berorientasi pada bagaimana mengatasi kompleksitas dan pluralitas masyarakat dewasa ini serta menciptakan kehidupan bersama yang demokratis dan berkeadaban.

## **2. 1. Demokrasi Deliberatif**

Ide demokrasi deliberatif pertama-tama diusulkan tahun 1980an oleh sejumlah pemikir seperti Bernard Manin, Joshua Cohen, dan Bruce Achermann. Mereka mengembangkan demokrasi deliberatif itu berdasarkan teori kritis dan teori tindakan komunikatif Habermas. Di tahun 1990an Jürgen Habermas sendiri merekonstruksi teori tindakan komunikatifnya ke dalam bidang politik.<sup>7</sup> Habermas merekonstruksi teori demokrasi deliberatif ini dalam rangka melengkapi kelemahan komplementer dalam liberalisme dan komunitarianisme.

Untuk memahami teori demokrasi deliberatif Habermas, pertama-tama perlu memahami lebih dahulu teori tindakan komunikatif yang digagas sebelumnya. Menurut Habermas, komunikasi sudah selalu merupakan ciri dasar kehidupan bersama manusia. Untuk mengembangkan teori tindakan komunikatif, Habermas membuat distingsi tegas antara kerja dan komunikasi sebagai dua dimensi dari praxis.<sup>8</sup> Konsep kerja adalah kategori dasar dalam materialisme sejarah Karl Marx. Habermas memahami kerja sebagai tindakan rasional bertujuan, tindakan instrumental atau tindakan strategis manusia atas alam. Tindakan strategis ini bersifat kalkulatif, terwujud dalam ilmu-ilmu alam dan teknologi. Habermas membedakan kerja dari komunikasi, di mana komunikasi adalah domain pragmatik dari relasi antar manusia. Bagi Habermas, sementara kerja menyangkut hubungan instrumental penguasaan atas dunia objek (hubungan manusia dengan alam), komunikasi berkenaan dengan hubungan antar manusia demi terwujudnya saling pengertian di antara subjek-subjek yang berkomunikasi.

Tuntutan demokrasi tidak lain daripada sebuah radikalisasi atas struktur-struktur komunikasi yang sudah menjadi praktek para warga sebagai manusia dalam kehidupan sosial. Komunikasi itulah yang mesti diwujudkan di dalam kehidupan bersama secara politis, sehingga negara hukum yang faktual sedikit demi sedikit dapat mendekati asas-asas normatifnya sendiri. Model deliberatif ini menekankan pentingnya prosedur komunikasi untuk meraih legitimasi hukum di dalam proses pertukaran yang dinamis antara sistem politik dan ruang publik yang

dimobilisasi secara kultural. Dalam model ini Habermas mencoba menghubungkan tesis hukumnya, yakni tesis tentang fungsi hukum sebagai medium integrasi sosial dengan sebuah teori sosiologis tentang demokrasi.<sup>9</sup>

Dalam bahasa Habermas sendiri, demokrasi deliberatif adalah suatu teori yang menerima diskursus rasional di antara para warga sebagai sumber legitimasi politik.<sup>10</sup> Pengertian ini bertolak dari asal usul istilah deliberatif, yakni *deliberatio* dalam bahasa Latin, yang berarti menimbang-nimbang secara rasional. Secara faktual, demokrasi deliberatif mengacu pada prosedur pembentukan pendapat dan aspirasi secara demokratis itu sendiri. Menurut Habermas, demokrasi deliberatif mendekati situasi pembicaraan ideal bila ia memenuhi kondisi-kondisi formal berikut. 1) inklusif, artinya tidak ada pihak yang dieksklusi/dikeluarkan dari partisipasi dalam diskusi mengenai topik-topik yang relevan baginya, dan tidak ada informasi relevan yang dilarang. 2). Bebas dari paksaan, artinya setiap orang boleh terlibat dalam argumen secara bebas, tanpa didominasi atau merasa diintimidasi oleh para partisipan lain. 3). Terbuka dan simetris, artinya masing-masing partisipan dapat menginiasi, melanjutkan, dan mempertanyakan diskusi mengenai topik yang relevan, termasuk prosedur-prosedur deliberatif. Selain itu, para partisipan juga tanpa batas boleh mengusulkan *scope* atau agenda mengenai deliberasi-deliberasi publik: topik-topik selalu terbuka, ditentukan oleh mereka yang berpartisipasi dalam diskusi-diskusi dan tunduk pada revisi bila diperlukan.<sup>11</sup> Ringkasnya, demokrasi deliberatif mensyaratkan semua pihak untuk saling memperlakukan sesama sebagai partner setara (*equal*), di mana setiap individu diberi ruang untuk bicara, saling mendengarkan, dan saling mempertanggungjawabkan posisi masing-masing.<sup>12</sup> Demokrasi deliberatif ini mengandaikan ruang publik sebagai forum berlangsungnya diskursus.

## **2. 2. Ruang Publik**

Menurut Habermas, ruang publik merupakan arena diskursif, yang berbeda dan terpisah dari sistem ekonomi dan negara, di mana warga berpartisipasi dan bertindak melalui dialog dan debat.<sup>13</sup> Artinya ruang publik adalah sebuah ruang otonom yang berbeda dari negara dan pasar. Ia otonom karena tidak hidup dari kekuasaan administratif mau pun ekonomi kapitalistis, melainkan dari *lebenswelt* atau masyarakat sipil. Istilah ruang publik yang dalam bahasa Jermannya "Öffentlichkeit", berarti "keadaan dapat diakses oleh semua orang." Itu berarti ruang publik politis

ini bukanlah sebuah lembaga formal, melainkan ruang informal yang melaluinya para warga berkomunikasi. Tetapi ini bukan komunikasi biasa. Ruang publik adalah arena di mana perdebatan publik terjadi. Habermas mengatakan bahwa ruang publik politis tidak lain daripada hakikat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari para warga negara dapat berlangsung.<sup>14</sup>

Ruang publik yang sehat harus memenuhi dua persyaratan, yakni bebas dan kritis. Bebas artinya setiap pihak dapat berbicara di mana pun, berkumpul, dan berpartisipasi dalam debat politik. Kritis artinya siapa pun boleh secara adil dan bertanggungjawab menyoroti proses-proses pengambilan keputusan yang bersifat publik.<sup>15</sup> Dengan kata lain, ruang publik adalah sebuah konsep normatif yang mengandaikan adanya komunikasi ideal, di mana para peserta berdiskusi dalam keadaan bebas dan setara, tanpa diskriminasi, tanpa tekanan satu terhadap yang lain dalam rangka membicarakan persoalan-persoalan kehidupan bersama. Konsep normatif ini kemudian menjadi tuntutan legitimitas hukum. Artinya hukum baru sah bila sudah melalui pemeriksaan dalam diskursus publik. Jadi, legitimitas suatu keputusan publik diperoleh lewat pengujian publik dalam proses diskursus yang menghubungkan suara rakyat dalam ruang publik dan proses legislasi hukum oleh lembaga legislatif dalam sistem politik. Titik sambung secara diskursif antara ruang publik dan sistem politik inilah yang memungkinkan rakyat disebut berdaulat.

Habermas menegaskan bahwa di dalam ruang publik itu tidak boleh ada satu tradisi budaya atau agama apa pun yang dapat mengklaim komitmen etisnya sebagai norma bagi semua yang lain.<sup>16</sup> Sebaliknya, dengan menjadi arena diskursif, ruang publik berfungsi melindungi pluralisme agama dan budaya, dan terutama ia dapat berguna memobilisasi komunikasi di antara para warga yang berbeda keyakinan agama dan budaya itu sehingga tercipta saling pengertian dan saling belajar. Lebih dari itu, dengan menjadi *locus* berlangsungnya komunikasi dan deliberasi yang bebas dan setara, yang saling menghargai hak masing-masing, ruang publik dapat mendorong terbentuknya solidaritas sosial.

Sebenarnya, dengan ruang publik, Habermas sedang mengintrodusir “kekuasaan komunikatif” yang diharapkan dapat berfungsi memaksa sistem politik (parlemen, eksekutif, yudikatif) untuk peka terhadap diskursus-diskursus masyarakat sipil. Dan dengan ruang publik itu, Habermas ingin agar politik tidak dipahami terjadi hanya dalam

badan-badan pemilihan formal dan birokrasi negara, tetapi juga dalam berbagai jaringan formal dan informal ruang publik. Habermas tidak menyangkal bahwa institusi-institusi demokratis itu penting. Tetapi masalahnya, seringkali pemerintah dan badan-badan pemilihan menganggap persetujuan rakyat berakhir di pemilihan umum, lalu mereka membuat keputusan-keputusan penting tanpa akuntabilitas dan transparansi yang memadai. Habermas menuduh liberalisme politik klasik dengan institusionalisasi lembaga-lembaga kekuasaannya yang dimutlakkan, didominasi filsafat kesadaran yang sangat subjektif, sehingga membungkam kedaulatan rakyat. Menurut Habermas, dalam kompleksitas masyarakat dewasa ini, kita hanya dapat menyebut “rakyat berdaulat”, jika negara, yakni lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif *tersambung* secara diskursif dengan proses pembentukan aspirasi dan opini dalam ruang publik.<sup>17</sup>

### **3.1. Meneropong Kepemimpinan Nasional (Negara-bangsa)**

Gagasan normatif demokrasi deliberatif dan ruang publik sebagaimana ditunjukkan di atas sangat ideal. Pertanyaannya, apakah kepemimpinan nasional, baik pada aras eksekutif maupun legislatif sudah mengandaikan kondisi deliberatif itu? Apakah sistem politik yang terbentuk sudah selalu tersambung dengan dan bertanggung jawab kepada publik?

Rupanya model kekuasaan komunikatif Habermasian itu masih jauh dari kenyataan di Indonesia. Sulit disangkal bahwa Indonesia mengalami masalah kepemimpinan yang serius. Tugas kepemimpinan yakni mampu memimpin dengan menyemangati langkah bersama menuju kebajikan publik masih jauh dari kenyataan. Sebab kepemimpinan yang masih saja dirasakan sekarang adalah kepemimpinan feodal, *top down*, otoriter, tidak bertanggung jawab, tidak jujur, berkualitas rendah, tidak efektif, melainkan cenderung ritualistik, sehingga tidak mampu mereformulasikan diri, dan apalagi mengembangkan inisiatif dan inovatif.<sup>18</sup> Situasi itu diperparah dengan perilaku korup para pejabat negara dalam segala dimensi (korupsi uang, waktu, kekuasaan, kemewahan dst.).

Ini masalah serius karena korupsi merupakan sikap nir-dedikasi yang melihat kepemimpinan sebagai sarana untuk menjadi kaya. Secara mikro, korupsi merasuk ke dalam segala hubungan profesional, bisnis, administrasi negara, dll dan menggerogoti kemampuan para pelaku (pemimpin) untuk bertindak profesional, objektif, rasional, tegas,

bermutu, bertanggung jawab dan adil. Pengaruh korosif korupsi moral menyeluruh ini paling pertama terasa dalam rendahnya kadar kepemimpinan di semua level kehidupan bangsa Indonesia. Padahal tanpa kepemimpinan yang memadai, kita tidak akan keluar dari berbagai persoalan bangsa.<sup>19</sup>

Pola kepemimpinan feodalistik dan koruptif ini mengakibatkan demokrasi yang mulai tumbuh sejak reformasi 1998 itu malah dipasung di tengah jalan. Akibatnya beberapa hal. *Pertama*, demokrasi yang seharusnya menghasilkan solidaritas justru membiarkan ekspansi pasar yang merusak solidaritas. *Kedua*, demokrasi yang seharusnya melindungi pluralitas justru membiarkan kekeuatan-kekuatan religio-politis yang mengancam pluralitas. *Ketiga*, demokrasi yang seharusnya menghasilkan kesetaraan justru membuahkan ketidaksetaraan. Problem-problem ini terjadi karena demokrasi elektoral sulit mewujudkan definisi demokrasi, yaitu *kratos* (pemerintahan) oleh *demos* (rakyat), karena *demos* yang dalam demokrasi elektoral direduksi menjadi *voters* (para pemberi suara) dikendalikan oleh oligarki.<sup>20</sup> Ini merupakan konsekuensi lebih jauh dari kepemimpinan nasional yang lemah dalam segala aspek selama ini.

Bukan hanya itu. Dinamika politik parlemen saat ini mempertontonkan sesuatu yang amat buruk. Kondisi keterbelahan badan legislatif menunjukkan bahwa orang-orang yang kita pilih untuk menjadi para pemimpin kita itu terputus dari kita, karena mereka hanya mengejar kepentingan diri berupa jabatan dan kekayaan. Mereka menjadi elite yang eksklusif dan terpisah dari warga. Kenyataan itu menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional jauh dari ideal kepemimpinan deliberatif.

Permasalahan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba saja terjadi. Sikap feodalistik para pemimpin itu merupakan konsekuensi dari kenyataan bangsa Indonesia yang selama orde baru berada di bawah kepemimpinan nasional yang mematikan partisipasi aktif masyarakat dengan kebijakan depolitisasi dan menyalahgunakan wahana musyawarah untuk memaksakan kehendak pemerintah secara sepihak. Cara-cara musyawarah untuk mencapai konsensus cukup lama diabaikan dan digantikan dengan model kepemimpinan yang bekerja dengan cara ko-optasi (penyogokan) dan intimidasi (penindasan).<sup>21</sup> Masalah yang muncul akibat sikap seperti itu adalah lahirnya kepemimpinan yang cenderung tidak bertanggung jawab, dan ini masih diteruskan oleh parlemen sekarang. Kenyataannya, setelah terpilih menjadi dewan, bukannya para wakil rakyat itu melakukan tugas-tugas pokoknya (legislasi, pengawasan, dan *budgeting*), melainkan sibuk bertarung memperebutkan jabatan dan

kekuasaan. Ambisi kekuasaan yang berlebihan ini akhirnya hanya akan menjauhkan mereka dari sumber kekuasaan, yaitu para warga. Terputusnya komunikasi dan tanggung jawab sistem politik (legislatif) terhadap masyarakat merupakan tanda krisis kepemimpinan serius dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **3.2. Mengusung Kepemimpinan Deliberatif**

Sosiolog Jerman, Max Weber mengintrodusir tiga macam kepemimpinan. *Pertama*, kepemimpinan tradisional. Kepemimpinan ini menuntut ketaatan daripada yang dipimpin (rakyat) atas dasar tradisi, yaitu adat-istiadat yang turun-temurun (termasuk agama). Jadi legitimasi kepemimpinan ini mengacu pada tradisi dan agama. *Kedua*, kepemimpinan kharismatik. Kepemimpinan ini mengacu pada kharisma yang melekat pada sosok tertentu. Dengan kata lain, legitimasi kekuasaan seseorang terletak pada kharisma yang ada pada dirinya. *Ketiga*, kepemimpinan rasional. Kepemimpinan ini didasarkan pada akal budi. Negara hukum modern adalah bentuk dari jenis kepemimpinan rasional itu. Lembaga-lembaga negara dipilih berdasarkan pertimbangan akal budi rasional manusia.<sup>22</sup> Jenis kepemimpinan terakhir inilah yang mendasari lahirnya kepemimpinan deliberatif Habermas.

Kepemimpinan deliberatif berarti mereka yang terpilih untuk berkuasa senantiasa menyadari bahwa demokrasi berarti pemerintahan oleh yang diperintah. Kesadaran ini membuat para pemimpinnya senantiasa membuka ruang-ruang komunikasi dengan para warga, dan peka terhadap kebutuhan publik yang lebih luas. Kepentingan publik seakan selalu mendesak para pemimpin dalam sistem politik sehingga mereka rela mengorbankan diri demi para warganya itu. Prinsipnya kepemimpinan ini mengandaikan kondisi demokratis yang ideal di mana selalu ada keterbukaan kepada publik (kepemimpinan bersifat inklusif) untuk berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, tidak mendominasi dan apalagi mengobjekan para warga, dan menjamin kebebasan dan kesetaraan di antara para warga maupun antara para pemimpin dan rakyat. Dengan kata lain, kepemimpinan deliberatif menyediakan ruang publik bagi para warga untuk kapan pun dapat menyampaikan dan mendesak opini dan kehendak mereka secara kritis dan bebas demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis.

Lebih jauh kepemimpinan deliberatif mengandaikan integritas seorang pemimpin yang memiliki kualitas moral tertentu. *Pertama*,

pemimpin harus berani bertindak sesuai hati nuraninya, dan bukan bersikap oportunistik. *Kedua*, ia harus memimpin secara transparan, artinya masyarakat dapat melihat apa yang dilakukannya. Ia harus dapat menjelaskan pertimbangan dan rasionalitas sebuah keputusan yang dibuatnya. Sang pemimpin tak boleh secara monolog dan soliter menetapkan kebijakan-kebijakannya tanpa pertimbangan publik. *Ketiga*, ia harus memiliki idealisme, yaitu cita-cita memajukan bangsanya dan bukan mau memperkaya diri sendiri melalui kekuasaannya. *Keempat*, ia harus bersedia dikritik dan dituntut pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. *Kelima*, ia harus adil, artinya bersedia mengaku kalau ia berbuat kesalahan, dan tidak melemparkan kesalahan pada bawahan. *Keenam*, ia harus memimpin secara komunikatif, artinya terbuka dan mengakui sumbangan orang lain, dan rendah hati.<sup>23</sup> Dan tentu saja, sang pemimpin mesti lebih taat pada konstitusi daripada konstituen.

### **3.3. Sisipan: Menengok Kepemimpinan dalam gereja**

Apabila mengacu pada pembagian jenis kekuasaan Weber sebagaimana dikatakan di atas, maka kepemimpinan dalam gereja (dan agama umumnya) termasuk kepemimpinan tradisional. Legitimasi kepemimpinan dalam gereja adalah Tuhan. Para pemimpin gereja dianggap dipilih oleh Tuhan untuk mewakili diri-Nya bagi umat. Namun kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa krisis kepemimpinan juga menggerogoti kehidupan dalam gereja. Tuhan hanya dipakai sarana (klise) legitimasi kekuasaan, padahal di baliknya ada berbagai macam ambisi pribadi yang mau dikejar. Banyak pemimpin sudah tidak lagi murni dalam pelayanan, karena sebenarnya di balik jubah kebesarannya mereka berpamrih, mencari kedudukan (kekuasaan), ingin menyingkirkan saingan, bahkan ada yang mencari uang. Korupsi dalam gereja, entah korupsi uang, korupsi kewewahan, korupsi kekuasaan, korupsi waktu, korupsi pelayanan bukan lagi hal tabu bagi banyak pemimpin. Rebutan kekuasaan/jabatan dalam gereja dan institusi-institusi keagamaan oleh para pemimpin sangat lazim dewasa ini di Indonesia.<sup>24</sup> Sikap-sikap ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam gereja (agama) juga telah mengalami masalah serius.

Gereja hanya akan memiliki masa depan yang lebih baik bila pola kepemimpinannya ditransformasi. Kita hidup dalam dunia yang makin terbuka dan maju, maka syarat-syarat kepemimpinan deliberatif perlu diadopsi dalam gereja. Kepemimpinan dalam gereja harus deliberatif, dalam arti mesti berlangsung rasional, demokratis, dan transparan.

Artinya apa pun yang dikerjakan pemimpin, mesti dikomunikasikan dengan umat dan umat pun mesti selalu dilibatkan dalam setiap kebijakan dan aktivitas kegerejaan. Umat bukan objek keputusan pemimpin, melainkan subjek yang mesti selalu diminta partisipasinya dalam kehidupan bergereja. Para pemimpin tak cukup merasa benar sendiri dengan mengatasnamakan Tuhan, tetapi perlu mendengar masukan dan kritik umat terhadap kebijakan-kebijakan dan agenda-agenda kegiatan gereja. Gereja adalah komunitas iman, di mana pemimpin maupun umat sama-sama menyadari sumber kedaulatan tertinggi berada pada Tuhan, dan bukan pemimpinnya.

Selain itu, karena sebagai komunitas iman, maka kepemimpinan dalam gereja harus mencerminkan kepemimpinan Yesus. Tuhan sebagai sumber kepemimpinan berarti Ia adalah teladan bagi para gembala umat. Tidak berarti bahwa tidak boleh ada kekurangan. Tetapi yang mutlak ada ialah semangat pelayanan. Yesus mengatakan: "Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan, dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu" (Matius 20: 26-27). Dan pada perjamuan malam terakhir, di mana Yesus mencuci kaki para muridnya dan Ia berkata: "Aku ada di tengah-tengah kamu seperti seorang pelayan" (Lukas 22:27). Kepemimpinan yang melayani dengan ikhlas seperti yang dicontohkan Yesus inilah yang mesti menjadi pedoman kepemimpinan dalam gereja. Teladan Yesus mau menegaskan bahwa pelayanan dengan penuh cinta kasih mesti menjadi ciri utama seorang pemimpin rohani. Ciri ini akan merangsang lahirnya sikap-sikap yang lain seperti kerendahan hati, bebas pamrih, positif, perhatian dan peduli, terbuka hatinya bagi semua tanpa membedakan, kesediaan untuk mengorbankan diri, dan menyangkal diri demi Tuhan semata.<sup>25</sup> Tanpa memiliki sikap-sikap semacam ini, kepemimpinan dalam gereja bukannya membawa berkat bagi umat, melainkan masalah bagi mereka. Dan itu juga bunuh diri masa depan gereja.

### Daftar Pustaka

#### Buku:

- Adams, Nicholas 2006, *Habermas and Theology*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Baxter, Hugh 2011, *Habermas: The Discourse of Law and Democracy*, Stanford: Stanford University Press.

- Bohman, James 1996, *Public Deliberation: Pluralism, Complexity, and Democracy*, Cambridge: The MIT Press.
- Borradori, Giovanna 2005, *Filsafat Dalam Masa Teror*, Jakarta: Kompas.
- Butler, Judith (et.al) 2011, *The Power of Religion in the Public Sphere*, Columbia: Columbia University Press.
- Casanova, José 1994, *Public Religion in the Modern World*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Deflem, Mathieu 1996, *Habermas, Modernity, and Law*, London: sage Publications.
- Devenney, Finlay Marx 2005., *Ethics and politics in Contemporary Theory*, London: Routledge.
- Finlayson, James Gordon 2005, *Habermas: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press.
- Forst, Rainer 2002, *Contexts of Justice: Political Philosophy Beyond Liberalism and Comunitarianism*, Berkeley: University of California Press.
- Habermas, Jürgen 1987 , *The Theory of communicative Action (Volume 2)*, Boston, Beacon Press
- ..... 1990 *Moral Consciousness and Communicative action*, Cambridge, MIT Press.
- ..... 1996, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge, Mass: MIT Press.
- ..... 1996, Three Normative Models of Democracy, dalam Benhabib, Seyla (Ed.) 1996, *Democracy and Difference*, Princeton University Press, Princeton.
- ..... 1999, *The Inclusion of the Other*, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
- ..... 2008, *Between Naturalism and Religion*, Cambridge: Polity Press.
- .....(et.al) 2010, *An Awareness of What is Missing*, Cambridge: Polity Press.
- .....2011, "The Political": The Rational Meaning of a Questionable Inheritance of Political Theology, dalam Judith Butler (et al), 2011, *The Power of Religion in the Public Sphere*, New York Chichester: Columbia University Press.
- Hardiman, F. Budi (1992) 2009, *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas*, Yogyakarta: kanisius
- ..... 1994, *Menuju Masyarakat Momunikatif*, Yogyakarta:

- Kanisius.  
..... 2009, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.
- .....(Ed) 2010, *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*, Yogyakarta: Kanisius.
- ..... 2013, *Dalam Moncong Oligarki*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hedrik, Todd 2010, *Rawls and Habermas: Reason, Pluralism, and The Claims of Political Philosophy*, Stanford: Stanford University Press.
- Ingram, David 2010, *Habermas: Introduction and Analysis*, Ithaca and London: Cornell University Press.
- Junker-Kenny, Mauren 2011, *Habermas and Theology*, London: T&T Clark International.
- Kleden, Paul Budi dan A Sunarko (ed.,) 2010. *Dialektika Sekularisasi: Diskusi Habermas – Ratzinger dan Tanggapan*, Yogyakarta dan Maumere: Lamalera.
- Magnis-Suseno, Franz 2000, *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, Yogyakarta: Kanisius
- ..... 2006, *Pijar-Pijar Filsafat: Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme*, Yogyakarta: Kanisius.
- ..... 2007, *Berebut Jiwa bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan*, Jakarta: Kompas.
- ..... 2014, *Iman dan Hati Nurani*, Jakarta: Obor.
- Latif, Yudi 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia.
- Norval, Aletta J., Democratic decisions and the Question of Universality: Rethinking recent approaches, dalam Simon Crutchley and Oliver Marchart (ed) 2004, *Laclau: A Critical Reader*, Abingdon, Oxon: Routledge.
- Notohamidjojo, O. 2011, *Kreativitas yang Bertanggungjawab*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana Press.
- Salim, Arskal 2008, *Challenging The Secular State : The Islamization of Law in Modern Indonesia*, Honolulu, University of Hawai'i Press.
- Steinbock, Uwe 2009, *The Philosophy of Jürgen Habermas*, Oxford: Oxford University Press.
- Titaley, John A. 2013, *Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agama-Agama*, Salatiga: Satya Wacana University Press.

- Tjahjadi, S.P. Lili, (ed.) 2005, *Agama dan Demokratisasi: Kasus Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Wahid, Abdurahman (ed) 2009, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute.
- Wattimena, Reza A. A. 2007, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, Yogyakarta: Kanisius.
- White, Stephen K (Ed) 1995, *The Cambridge Companion to Habermas*, Cambridge: Cambridge University Press

**Jurnal/Majalah:**

- Baumeister, Andrea, The Use of "Public reason" by Religious and Secular Citizens: Limitations of Habermas' Conception of the Role of Religion in the Public Realm, dalam *Constellations* Volume 18, no 2, 2011
- Boettcher, James W., Habermas, Religion and the Ethics of Citizenship, dalam *Philosophy and Social Criticism*, 2009
- Chambers, Simone, How Religion Speaks to the Agnostic: Habermas on the Persistent Value of Religion, dalam *Constellations* Vol 14, no 2, 2007
- Cooke, M., Salvaging and Secularizing the Semantic Content of Religion: The Limitations of Habermas's Postmetaphysical Proposal, *International Journal for Philosophy of Religion* 60, 2006
- Duvenage, Pieter, Communicative Reason and religion: The Case of Habermas, dalam *Springer*, 2008
- González, Alsa, dkk., Beyond and Conflict: Religion in the Public Sphere and Deliberative Democracy, dalam *Springer*, 2009.
- Harrington, Austin, Habermas and the 'Post-Secular Society', dalam *European Journal of Social Theory*, 2007
- Irlenborn, Bernd, Religion in the Public Sphere: Habermas on the Role of Christian Faith, dalam *the Heythrop Journal*, 2011.
- Majalah *Basis*: Edisi 75 Tahun Jürgen Habermas, no. 11-12, tahun ke-53, November-desember 2004.
- Menoh, Gusti, Mengurai Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Pemikiran Jurgen Habermas, dalam *Titik Temu* (Jurnal Dialog Peradaban), Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2011.
- Sunarko, A., Agama di Ruang Publik Demokratis Indonesia, dalam *Basis* no 03-04, tahun ke-62, 2013
- Yates, Melisa, Rawls and Habermas on Religion in The Public Sphere, dalam *Philosophy & Social Criticism*, Vol. 33 no 7, 2007

## Koran

Ignas Kleden, Keluar dari Jebakan Involusi, dalam *Kompas*, 31 Oktober 2014

Masdar Hilmy, Membelah Indonesia, dalam *Kompas*, 3 November 2014.

Ikrar Nusa Bhakti, DPR yang Terbelah, dalam *Kompas*, 3 November 2014

## Endnote

1. Masdar Hilmy, Membelah Indonesia, dalam *Kompas*, 3 November 2014, 7
2. Ikrar Nusa Bhakti, DPR yang Terbelah, dalam *Kompas*, 3 November 2014, 6
3. Ignas Kleden, Keluar dari Jebakan Involusi, dalam *Kompas*, 31 Oktober 2014, 6
4. Bdk. James Gordon Finlayson, *Habermas: A Very Short Introduction*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), Xi
5. David Ingram, *Habermas: Introduction and Analysis*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 2010), 1
6. David Ingram, *Habermas: Introduction*, 2.
7. Marx Devenney, *Ethics and politics in Contemporary Theory*, London: Routledge, 2005, hlm 124
8. David West, *An Introduction to Continental Philosophy*, (Cambridge: Blackwell Publishers 1996) 68.
9. F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 126.
10. Jürgen Habermas, *Between Facts and Norm: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, (Cambridge, Mass: MIT Press, 1996), 110.
11. Dikutip dalam Ilan Kapoor, "Deliberative Democratic or Agonistic Mouffe? The Relevance of the Habermas-Mouffe Debate for Third World Politics" *Alternatives*, Columbia University, Vol 27, No 4, 2002), 461-2.
12. Aletta J. Norval, "Democratic decisions and the Question of Universality: Rethinking recent approaches", Simon Crtchley and Oliver Marchart, *Laclau: A Critical Reader* ( Abingdon, Oxon: Rotledge, 2004), 142.
13. Ilan Kapoor, "Deliberative Democratic", 461.
14. Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, 134.
15. Reza A. A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 126-7.
16. Nicholas Adams, *Habermas and Theology*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 5.
17. F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto?* Basis: edisi november-desember 2004, hlm 19
18. Franz Magnis-Suseno, *Iman dan Hati Nurani*, Jakarta: Obor, 2014, 79
19. Franz Magnis-Suseno, *Iman*, 78-79
20. F. Budi Hardiman, *Dalam Moncong Oligarki*, Yogyakarta: Kanisius, 2013, hlm. 3
21. Franz Magnis-Suseno, *Iman*, 79-80
22. O. Notohamidjojo, *Kreativitas yang Bertanggungjawab*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana Press, 2011, 385-387
23. Franz Magnis-Suseno, *Iman*, 82-84
24. Lih. Franz Magnis-Suseno, *Iman*, 86
25. Bnd Franz Magnis-Suseno, *Iman*, 86



## **Konsekuensi Distorsi Komunikasi dalam Kepemimpinan (Telaah terhadap Narasi Pembantaian Anak-anak oleh Herodes Agung dalam Matius 2:1-18)**

Albert Josua P. Maliogha

### **Abstract**

*Communication in leadership have strategic role for reach the aim of a leader. But, communication in leadership also able to distorted to be a tool of propaganda wich manipilative to justice a pressure and deadly leadership, in the same time to secure their authority. Thus the practice of turns made by Herod the Great when respons the Christ is born. Feel afraid that political impact of Christ able to disturb his authority and threat his leadership. The Great Herod open communication sphere with the Magi and the Jewish Religious Leaders to know something about Christ. Through an interdisciplinary approach this writing will highlight a distortion of communication which do by The King of Great Herod in the naration of Matthew 2: 1-18 especially in the motive of assumption frame an communication that although procedurally was hold many part, but ironically precisely a tool to fulfill maintain a political interests by killing innocent children. This writing aims to give illustration about the face of choice of leadership model that despotic which often manipulate communication for leader interests and its implication for leadership.*

**Keywords:** *communication, distortion of communication, The Great Herod, authority, Children killing.*

### **Pendahuluan**

Tempat komunikasi dalam kepemimpinan sangat sentral sebab dengannya relasi interpersonal antara pemimpin dan yang dipimpin dapat berlangsung. Komunikasi itu pula tak pernah lepas dari dimensi utama dalam kepemimpinan yaitu pengelolaan kekuasaan. Hanya dengan komunikasi maka pengelolaan kekuasaan dalam kepemimpinan dapat terlaksana. Implikasinya tentu komunikasi dapat memainkan peran yang manipulatif-destruktif atau sebaliknya konstruktif-transformatif pada penyelenggaraan kekuasaan dalam kepemimpinan.

Herodes Agung ialah seorang raja yang terkenal hebat dalam pembangunan lagi keji dalam mempertahankan kekuasaan kepemim-

pinannya.<sup>1</sup> Gambaran dalam narasi injil Matius 2:1-18 yang berakhir tragis pada pembantaian anak-anak dibawah usia 2 tahun hanyalah salah satu rekam jejak yang menunjukkan kebengisan Herodes Agung demi hasrat akan kekuasaan. Demi mengejar stabilnya kekuasaan kepemimpinan yang ia miliki rupanya Herodes Agung tak segan melakukan berbagai hal, persis seperti apa yang kemudian dipikirkan Machiavelli tentang politik dan kekuasaan.<sup>2</sup>

Akan tetapi titik yang menarik daripada narasi Matius 2:1-18 bukan saja terletak pada tindakan tanpa iba Herodes Agung dalam membantai anak-anak. Namun terutama pada bagaimana situasi yang sedemikian rupa terjadi yang mendorong kebrutalan Herodes Agung tersebut. Dalam hal ini nampak jelas merujuk pada plot narasi bahwa komunikasi yang cukup intensif antara tokoh Herodes Agung dengan tokoh-tokoh lain seperti Para Majus dan Pemuka Agama Yahudi menjadi salah satu faktor pendorong keputusan kejam tersebut diambil. Artinya kekejaman Herodes Agung merupakan konsekuensi dari komunikasi yang ia sendiri lakukan.

Tulisan ini membahas pembantaian anak-anak oleh raja Herodes Agung pada narasi Matius sebagai konsekuensi dari komunikasi yang terdistorsi dalam kepemimpinannya. Untuk itu penulis akan memaparkan latar belakang kepemimpinan Herodes Agung dalam kedudukan sosio-politiknya lalu diikuti dengan pembahasan tentang tindakan komunikasi Herodes Agung dalam Matius 2:1-18.

### **Latar Belakang Sosio-Politik Herodes Agung**

Herodes Agung lahir dan besar dalam keluarga yang kental dengan intrik politik dan pengejaran kekuasaan. Ketika tahun 66 SM terjadi perang saudara antara Hirkanus II dengan Aristobulus II untuk memperebutkan kekuasaan atas Yudea, Antipater ayah dari Herodes Agung berpihak pada kelompok Hirkanus II. Dalam perang tersebut Aristobulus II mencoba meminta bantuan Jendral Romawi Pompeius. Akan tetapi lobi politik Hirkanus II dan Antipater rupanya lebih menyakinkan sang Jenderal dari pada Aristobulus II. Akhirnya melalui bantuan Romawi wilayah Yudea jatuh ke tangan Hirkanus II sebagai Imam Besar dan sang sekertaris Antipater pada tahun 63 SM.

Keluarga Antipater mendapat keuntungan yang begitu banyak dari afiliasi politik mereka tidak hanya kepada Hirkanus II namun terutama kepada penguasa Romawi. Kelihain Antipater dalam bermanuver pada panggung politik membuat ia mengubah pelabuhan kekuasaannya dari